

BAB IV

KEMENANGAN EMMANUEL MACRON DALAM PEMILIHAN PRESIDEN PERANCIS TAHUN 2017

Dalam bab yang sebelumnya penulis telah memaparkan mengenai subjek penelitian yakni Sistem Politik Perancis, isu imigran di Perancis, dan profil Emmanuel Macron, yang dapat dijadikan referensi dalam kerangka berpikir penelitian ini. Oleh karena itu, selanjutnya penulis akan berupaya menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, yakni faktor-faktor kemenangan Emmanuel Macron secara komprehensif.

Penulis mengajukan hipotesa bahwa terdapat dua faktor yang menentukan kemenangan Emmanuel Macron dalam pemilihan presiden Perancis tahun 2017, yakni Emmanuel Macron menggunakan strategi pembingkaihan (*framing*) terhadap isu anti-imigran dalam kampanye Marine Le Pen sebagai seruan retorik negatif yang disebut '*The Spirit of Defeat*', kemudian, Macron meyakinkan (*persuading*) pemilih dengan menggunakan seruan retorik positif dalam kampanyenya yang disebut sebagai '*The Spirit of French Conquest*'. Hipotesa ini dilandaskan pada kerangka konseptual 'Strategi Kampanye Aktor Politik' yang digagas oleh Kriesi, Bernhard, dan Hanggli dalam artikelnya yang berjudul *Political Strategies in Direct-Democratic Campaigns* (2007).

Faktor-faktor tersebut akan penulis paparkan dalam beberapa sub-bab dengan pendekatan yang digunakan oleh konsep 'strategi kampanye aktor politik' untuk menjelaskan kemenangan Emmanuel Macron pada Pemilihan Presiden Perancis di tengah hiruk-pikuk permasalahan imigran yang melanda Perancis.

Tabel 4.1:
Struktur Pendekatan dari Konsep Strategi Kampanye
Aktor Politik oleh Kriesi, Bernhard, dan Hanggli.

Context Conditions	Coalition Formation	Strategies (Mobilizing/crafting the message)	Impact
<ul style="list-style-type: none"> •Institutions •Issues •exogenous Shocks •predispositions 	<ul style="list-style-type: none"> • configuration of actors • goals/beliefs • resources 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilizing <ul style="list-style-type: none"> - Timing - Targetting - Choosing the channels • Crafting the messages <ul style="list-style-type: none"> - Framing - Persuading 	<ul style="list-style-type: none"> • Attention • Support

Menurut pendekatan yang digunakan oleh konsep strategi kampanye aktor politik, hal yang pertama kali dilakukan oleh aktor politik dalam memulai strategi kampanyenya adalah dengan memilih konteks apa yang akan digunakan dalam menyebarkan pengaruhnya. Konsep ini menjelaskan bahwa institusi dan konfigurasi politik adalah sebuah *organizers* dari pilihan-pilihan politik, karena keduanya akan menentukan aturan-aturan dari permainan kampanye terutama interaksi logika antara elit-elit politik, media massa dan orang awam.

Dalam pembuatan pilihan-pilihan rasional, masyarakat atau orang awam tidak harus bergantung kepada keterbatasan sumber informasi dan kapasitasnya, akan tetapi dengan bantuan institusi politik melalui kampanye, mereka mampu membuat pilihan-pilihan koheren. Oleh karena itu, aktor politik harus jeli dalam menilai institusi dan isu populis yang sedang berlangsung, sehingga konteks tersebut mampu memberikan arah atau haluan yang jelas bagi aktor politik untuk melakukan langkah strategi selanjutnya, yakni pembentukan koalisi.

Menurut Kriesi, Bernhard, dan Hanggli, mengingat sifat biner alamiah dari pilihan *direct-democratic* (demokrasi langsung), dalam setiap kampanye demokrasi langsung, terdapat dua jenis koalisi; Koalisi pemerintahan yang membela posisi mayoritas, dan koalisi lawan membela posisi oposisi. Pilihan ini selalu berada di antara *status quo* dan proposal alternatif yang isu-spesifik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam sistem kepartaian Perancis, terdapat dua partai besar yang melekat pada konteks politik Perancis. Oleh karena itu, akan menjadi hal yang wajar apabila Macron memilih untuk mengusungkan diri sebagai presiden dari salah satu kekuatan besar tersebut. Partai sosialis adalah *incumbent* pada saat itu, namun kebijakan partai sosialis tidak sinergis dengan program yang dimiliki oleh Macron, hal ini menyebabkan keluarnya Macron dari partai tersebut yang tampaknya juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, yakni menurunnya popularitas partai sosialis, terkait kekecewaan rakyat Perancis karena pemerintahan yang sedang berjalan tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang krusial di Perancis, salah satunya adalah permasalahan imigran.

Memasuki era ekonomi digital, secara perlahan tatanan ekonomi global berubah. Hal ini menandakan kemunduran bagi Partai Sosial Demokrat. Jonas Pontusson dalam tulisannya “*Explaining the Decline of European Social Democracy*” mengungkapkan kemunduran demokrasi sosial Eropa dapat dilihat hasil dari dua perubahan struktural ekonomi: pergeseran ke unit produksi industri yang lebih kecil dan pertumbuhan lapangan kerja non-industrial swasta. Hal ini berpengaruh pada keanggotaan serikat pekerja, yang menjadi sumber terpercaya bagi perekrutan organ dan partai kiri. Akibatnya, jumlah anggota terus menurun. Kaum sosialis juga merasa kesulitan

menyesuaikan retorika mereka terutama di kalangan anak muda.⁵⁴

Kesulitan dalam memobilisasi nilai-nilai di dalam partai tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya pengaruh dalam interaksi logika antara partai dan aktor politik kepada publik, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada partai dan aktor yang bersangkutan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kriesi, Bernhard,

Menurunnya tingkat kepercayaan terhadap Francois Hollande dan Jean-Marc Ayrault ini dapat terlihat dari polling yang dilakukan oleh BVA (18/01/13). Dimana 59% responden menganggap kebijakan yang diambil oleh Hollande adalah keliru sedangkan hanya 25% responden yang menganggap kebijakan tersebut Konstruktif. Popularitas dari Hollande pun menurun ke angka 43%, penurunan yang sama juga terjadi pada popularitas Jean-Marc Ayrault yang hanya 38%. Sedangkan menurut *Word Socialist Web Site* (29/03/13) popularitas Hollande bahkan saat ini telah tenggelam ke angka 30 persen, rekor terendah antara presiden Perancis sejak jajak pendapat tersebut pernah dilakukan. Bahkan Hollande kehilangan dukungan di antara basis pemilih Partai Sosialis yang merupakan partai utama yang menyokongnya. Akibatnya hanya 30 persen remaja dan 32 persen dari pekerja manual yang masih mendukung tampuk kepemimpinannya. Keadaan tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi Hollande dan Ayrault dalam mendapatkan legitimasi dari rakyat Prancis dari setiap kebijakan yang diambil nantinya.⁵⁵

Fenomena ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Emmanuel Macron yang pada saat itu memutuskan untuk keluar dari Partai Sosialis dan mendirikan gerakan politiknya sendiri yang beraliran tengah, *En Marche*. Macron yang

⁵⁴ Debora, *Ibid*.

⁵⁵ Novianto, *Ibid*.

notabene merupakan ahli dalam bidang ekonomi, tidak menemukan titik kesepakatan dengan kebijakan Hollande. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam menilai konteks institusi dan menentukan konfigurasi aktor dan/atau institusi untuk dijadikan sebagai koalisi, Macron memilih untuk meninggalkan *status quo* (Partai Sosialis) dan mendirikan gerakannya sendiri yang merupakan alternatif dengan proposal isu-spesifik (Liberal dan Pro Uni-Eropa).

Pada kenyataannya, terlepas dari dampak-dampak lain pilpres terbaru Perancis, hal yang membedakan pilpres ini dengan yang lain adalah tersingkirnya dua partai asli Perancis yaitu Partai Republikan dan Partai Sosialis, dari arena pemilu. Dengan kata lain, naiknya Macron dapat menjadi indikasi kemunculan era "Post-Partisan" di Perancis. Artinya, pengaruh partai-partai arus utama di Perancis, minimal hingga waktu yang tidak akan lama lagi, akan mengalami penurunan, dan sebagai gantinya partai-partai yang akan terjun di arena politik Perancis adalah partai-partai yang sebelumnya tidak terlalu mendapat perhatian.⁵⁶

Dampak dari pilpres terbaru Perancis mungkin paling dirasakan oleh Partai Sosialis yang mengalami perubahan penting di dalam tubuh partai tersebut. Pilpres Perancis menunjukkan bahwa Partai Sosialis yang menjadi partai berkuasa di negara itu selama puluhan tahun, sekarang telah kehilangan posisinya di arena perpolitikan negara ini dan sedang mengalami penurunan tajam. Masalah ini semakin jelas tatkala sejumlah petinggi Partai Sosialis memprotes kinerja partai seperti yang dilakukan Manuel Valls, mantan Perdana Menteri Perancis dan keputusannya untuk bergabung dengan kubu Emmanuel Macron. Valls bahkan sebelum dimulainya putaran kedua pilpres Perancis, mengumumkan dukungan atas

⁵⁶ ParsToday. 2017. *Tantangan-tantangan Pemerintahan Baru Perancis*. (http://parstoday.com/id/radio/world-i39094-tantangan_tantangan_pemerintahan_baru_perancis, diakses 16 Januari 2018)

garis politik Macron dan akan mengikutinya. Namun demikian, poin penting dari manuver Valls ini adalah pandangannya terhadap Partai Sosialis.⁵⁷

Valls percaya, Partai Sosialis sudah mati dan tersingkir dari arena politik Perancis. Hal ini membuktikan bahwa para petinggi partai kiri inipun memahami kondisi buruk partainya dan sekarang berusaha menjalin koalisi dengan partai-partai baru. Di sisi lain, Benoit Hamon, kandidat Partai Sosialis yang hanya mampu meraih sekitar enam persen suara, sehubungan dengan anjloknya reputasi partai ini berjanji akan mendirikan gerakan kiri baru di Perancis. Hamon menegaskan upayanya untuk merekonstruksi partai berhaluan kiri di Perancis dan mengumumkan akan tetap bergabung dengan Partai Sosialis. Pasca kekalahan Partai Sosialis dalam pilpres terbaru Perancis, terjadi perseteruan sengit di tubuh partai ini dan memaksanya berhadap dengan krisis ideologi.⁵⁸

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Emmanuel Macron dan Marine Le Pen telah menentukan *institutional context* dan koalisi pendukungnya yang kemudian menjadikan mereka pemenang dalam Pemilihan Presiden Perancis putaran pertama. Hal yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Macron yang mengangkat isu pro imigran di tengah *mainstream*-nya isu anti-imigran yang notabene diangkat oleh Marine Le Pen. Secara sederhana, Riker menjelaskan dalam dua prinsip *heresthetics* yang ia kembangkan; ‘Prinsip Dominan’ menyatakan bahwa ‘ketika salah satu pihak telah mendapatkan keuntungan dari suatu isu, maka pihak satunya akan mengabaikan (isu) itu’; Kemudian, berdasarkan ‘Prinsip Dispersi’, kedua belah pihak akan mencari isu baru yang mampu memberikan keuntungan, ketika kedua belah pihak tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari suatu isu. Maka berdasarkan teori tersebut, perilaku Macron yang mengangkat

⁵⁷ ParsToday.com, *Ibid.*

⁵⁸ ParsToday.com, *Ibid.*

isu pro imigran disaat yang sama Le Pen mengangkat isu anti-imigran telah dijelaskan oleh Prinsip Dominan tersebut. Sehingga, strategi yang dipersiapkan selanjutnya oleh Macron adalah bagaimana isu tersebut dapat diterima oleh pemilih.

Isu pro imigran dalam kampanye Emmanuel Macron sejatinya adalah mengenai interaksi logika yang berhasil dibangun oleh Emmanuel Macron guna mempengaruhi dan mengendalikan lawan politiknya, media massa, dan publik. Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh penulis dalam sub-bab selanjutnya, dimana isu pro imigran menjadi bagian dari strategi kampanye Emmanuel Macron, dan dianalisa menggunakan pendekatan Kriesi, Bernhard, dan Hanggli pada tahap *Crafting the Message* hingga mencapai tahap akhir yakni *Impact* (hasil dan evaluasi).

Kita mulai dari anggapan bahwa informasi bukanlah barang yang langka, namun faktor yang langka adalah perhatian untuk informasi tertentu. Pada saat tertentu, perhatian masyarakat hanya bisa difokuskan pada sejumlah masalah politik. Masyarakat sangat sensitif dalam hal informasi baru. Dilihat dari perspektif pendekatan *agenda setting*, informasi semacam itu selalu ambivalen, oleh karena itu pemilihan, penyajian dan interpretasi informasi oleh elit politik dan media memainkan peran kunci.

Faktor apa saja yang membimbing strategi *framing* aktor politik? Riker (1996) telah merumuskan dua prinsip *heresthetics*: 'Prinsip dominasi' menyatakan bahwa 'ketika satu pihak memiliki keunggulan dalam sebuah isu, pihak lain mengabaikannya'. Menurut 'prinsip dispersi', kedua belah pihak mencari isu baru dan menguntungkan, bila tidak ada pihak yang memiliki keuntungan.

Kemudian, setelah aktor politik melakukan *framing* terhadap suatu isu, aktor politik akan melakukan persuasi pesan-pesan politiknya kepada publik. Kemungkinan bahwa publik akan secara kritis mengevaluasi argumen yang

terdapat dalam pesan ditentukan oleh motivasi dan kemampuan memproses informasi.

Jika penerima termotivasi dan mampu memproses informasi, mereka akan terlibat dalam proses informasi yang sistematis (jalur utama untuk persuasi). Penentu terpenting motivasi seseorang untuk memikirkan argumen yang terkandung dalam pesan adalah relevansi pribadi yang dirasakannya. Apabila masalah itu penting bagi mereka secara pribadi maka mereka akan termotivasi untuk kritis dalam mengevaluasi argumen yang terdapat dalam pesan-pesan suatu kampanye.

Selain adanya faktor motivasi dan kemampuan publik dalam menerima informasi, aktor politik harus memiliki daya tarik/seruan dalam mengangkat isu kampanyenya. Kriesi, Bernhard, dan Hanggli menemukan bahwa dalam seruan seorang aktor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni *negativism* dan *positivism*.

Negativisme juga menjadi pilihan penjualan bagi pemilik media dan redaksi. Menurut teori 'media malaise'⁵⁹, kerangka dominan politik dalam jurnalisme kontemporer sangat bias terhadap negativisme. Mereka menekankan pada penderitaan daripada kompromi, perpecahan daripada persatuan, berita buruk (tentang biaya, kekalahan, kegagalan, bahaya, krisis, seks dan skandal, kematian dan bencana, ketidakmampuan politik dan korupsi, dan hal lain yang sensasional) daripada kabar baik (faedah, kemenangan, kisah sukses, peluang, solusi). '*Attack journalism*', yang dikatakan lebih umum, mendorong aktor politik untuk berkampanye secara negatif dengan menyerang lawan mereka, bukan dengan menyampaikan kasus mereka sendiri.

⁵⁹ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *malaise/ma·lai·se/* adalah (kata benda) keadaan lesu dan serba sulit (terutama dalam bidang perekonomian); (keadaan) perasaan kurang sehat dan lesu, yang mendahului timbulnya keadaan sakit yang lebih gawat

Pada dasarnya, akan selalu terdapat sebuah celah untuk membingkai (*framing*) suatu permasalahan politik. Pengolahan informasi, dengan kata lain, menyediakan suatu *baseline* untuk mengatur perhatian dari media maupun dari warga-pemilih. Dengan begitu, perjuangan untuk memperoleh perhatian di antara para aktor elit politik merupakan elemen kunci dari sebuah kampanye; dan yang lebih umum, untuk politik yang demokratis (Burstein 1998:vi), dan pergeseran perhatian (Baumgartner, & Jones 2002; Jones 1994) menjadi mekanisme yang krusial dalam berkampanye.

Dalam strategi *framing*, pada akhirnya aktor politik hanya mampu mengambil keuntungan dari suatu isu apabila berhasil membuat isu yang ia angkat diterima oleh publik. Sebagaimana yang ditinjau oleh Sides (2006), apabila aktor politik menggunakan prinsip dominan atau dispersi oleh Riker, maka kedua prinsip tersebut memancing satu pertanyaan baru, yakni hal apa yang membantu aktor politik untuk memperoleh keuntungan dari suatu isu, untuk menjawabnya Sides menghubungkan kedua prinsip tersebut dengan teori 'kepemilikan isu', teori ini menyatakan bahwa "keuntungan akan diperoleh dan memuncak dari reputasi yang telah dibangun sang aktor politik dalam bentuk pembuatan kebijakan terhadap isu tersebut".

Kemudian, dalam kondisi apa manajemen isu dapat dikatakan berhasil? Druckman (2004) mempelajari 'Efek *Framing* Equivalen' dan ia menemukan bahwa efek dari *framing* menjadi tidak kuat atau tidak meresap apabila aktor tersebut terpapar oleh *framing* tandingan, dan jika mereka terlibat dalam diskusi dengan kelompok yang heterogen. Sehingga, dalam kata lain, *framing* memiliki efek yang terbatas, di mana kita hanya bisa mengharapkan *framing* menjangkau lebih luas dalam mempengaruhi sebuah kasus, hanya saat kampanye benar-benar mendominasi.

Oleh karena itu, setelah melalui proses *framing* suatu isu, seorang aktor politik harus melakukan *persuading* yang

mampu meyakinkan pemilih sekaligus mengendalikan lawan politiknya. Dalam mengolah pesan politik, persuading adalah fase ketika strategi retorik benar-benar melaksanakan tugasnya untuk mempengaruhi perilaku pemilih. Strategi ini memiliki daya tarik kepada pengolahan informasi baik sistematis maupun *peripheral*. Sebagaimana yang kita tahu, persuasi dapat dimediasikan oleh pengolahan informasi yang terperinci, atau ia bekerja melalui proses-proses pengkondisian klasik atau eksposur belaka.

Dalam *persuading*, sangat penting bagi aktor politik untuk membedakan antara seruan negatif atau positif. Hal itu akan mengarahkan kepada klasifikasi dari seruan retorik yang akan dijelaskan pada tabel 4.2. Argumen adalah bentuk seruan yang paling rumit, diikuti oleh emosi-emosi dan dukungan-dukungan.

Tabel 4.2:
Klasifikasi Seruan Retorik

General direction	Degree of Elaboration		
	Systematic (Central)	Systematic/heuristic	Heuristic (peripheral)
	Arguments	Emotions	Actor-centered
Positive	In support of one's own position	Excitement/enthusiasm	Endorsing
Negative	Against adversary's position	Anxiety/stress/fear	Stigmatising/discrediting/blaming

Melalui tabel ini, dapat dijelaskan secara sederhana, apabila aktor politik memilih seruan retorik negatif atau positif, maka akan memiliki dampak yang sangat berbeda. Aktor politik harus menyadari bahwa dirinya adalah retorik negatif atau positif, status quo atau reformis. Aktor yang membela status quo, biasanya tidak memiliki apapun untuk dipertahankan secara positif. Begitu juga dengan para reformis yang menawarkan alternatif untuk status quo, namun tidak sepenuhnya bisa dipahami dan pada dasarnya, rentan, oleh karenanya, seruan retorik apapun sejatinya memiliki kelemahan masing-masing.

Berdasarkan pada penjelasan *framing* dan *persuading* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi kampanye oleh aktor politik yang sebenarnya adalah tentang pengolahan pesan politiknya; bagaimana mereka menggunakan kemampuan *repertoire*-nya untuk mengangkat suatu isu, menjadikannya isu yang dapat diserap dan diterima oleh pemilih, mengendalikan posisi lawan politik, dan mempengaruhi pemilih untuk memberikan suara kepadanya.

A. Strategi Framing

Berdasarkan pada data yang penulis kutip dari *House of Commons Library* pada tahun 2017, Marine Le Pen adalah pemimpin dari Partai Front National sampai pada akhir April 2017. Le Pen mengambil alih kepemimpinan dari Jean-Marie Le Pen, ayahnya, yang ternyata juga berhasil mencapai Pemilihan Presiden Perancis pada tahun 2002. Partai Front National sendiri didirikan pada tahun 1972 oleh Le Pen dengan kebijakan nasionalis, anti-imigran yang kuat, dan sering disebut sebagai ‘sayap kanan’.

Gambar 4.1: Marine Le Pen



Sumber: <https://www.politico.eu/article/marine-le-pen-french-far-right-proposes-renaming-national-front-party-national-rally/>

Marine Le Pen mempelajari ilmu hukum di Pantheon-Assas University, salah satu sekolah hukum terkemuka yang ada di Perancis. Le Pen lulus dengan gelar Master of Laws di tahun 1991 dan Master of Advanced Studies dalam hukum pidana pada tahun 1992, kemudian ia berlatih sebagai pengacara di Paris selama enam tahun. Sebuah fitur dalam biografi Le Pen yang seringkali menjadi bahan pembicaraan adalah sikap anti-imigrasi partainya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaan firma hukumnya, dia bekerja sebagai pengacara tugas yang ditunjuk oleh negara, membela imigran gelap yang menghadapi deportasi. Penjelasan Le Pen terhadap pilihannya ini, ia mengatakan dalam sebuah wawancara TV akhir-akhir ini: “mereka adalah manusia yang memiliki hak. Kami tidak menyalahkan kebijakan imigrasi kepada mereka. Itu bukan salah mereka”.

Pada tahun 1998, di usia ke 30, Le Pen meninggalkan pekerjaannya sebagai pengacara untuk kemudian bergabung dengan departemen hukum Partai Front National. Di tahun yang sama, Le Pen memenangkan pemilihan pertamanya

sebagai anggota dewan regional untuk Front National di Henin-Beaumont, bekas kota pertambangan batu bara di utara. Le Pen terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 2004, kursi yang hingga saat ini dia duduki.

Sebuah profil dari BBC tentang Le Pen, menyebutkan ‘kebangkitan politiknya’ muncul karena sebuah insiden ketika ia berusia delapan tahun, November 1976, pada saat itu ia selamat dari pengeboman di rumah keluarganya di Paris, bom itu ditujukan untuk ayah dan keluarganya.

Pemilihan Presiden kali ini adalah percobaan keduanya dalam memenangkan jabatan Presiden Perancis. Pada tahun 2012, ia menduduki posisi ketiga dalam Pemilihan putaran pertama, dengan perolehan suara hampir 18%. Hal itu merupakan pencapaian terbaik oleh Front National pada pertarungan presidensial, melebihi hampir 17% yang pernah dicapai ayahnya pada tahun 2002 (meskipun dengan angka tersebut sudah cukup untuk membawanya pada putaran kedua). Peningkatan kinerja ini sebagian besar dikreditkan kepada usahanya dalam memindahkan partai dari kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial di masa lalu.

Marine dan Jean-Marie Le Pen, dilaporkan menjauh dari satu sama lain dan belum pernah berinteraksi selama lebih dari dua tahun. Pada April 2015, dalam sebuah wawancara radio, ayah dari Marine Le Pen mengulangi kembali kontroversinya yang dahulu pernah disebabkannya pada September 1987 terkait *Holocaust*. Jean-Marie Le Pen ditanyakan apakah ia menyetujui pandangan denominasi holocaust, dan Le Pen menjawab: “Saya tidak mengatakan bahwa kamar gas tidak ada. (Hanya saja) saya tidak pernah secara pribadi menyaksikannya. Saya tidak pernah secara khusus mempelajari masalah ini, tetapi saya percaya bahwa (holocaust) itu adalah salah satu titik penting dalam sejarah perang dunia kedua”. Pengulangan kata-kata aslinya ini kemudian menyebabkan Marine Le Pen untuk mengusir ayahnya dari partai pada Agustus 2015.

Terdapat beberapa perdebatan apakah Partai Front National harus dilabeli sebagai ‘kanan jauh’ atau tidak.

Marine Le Pen telah berupaya untuk melunakkan citra partai semenjak mengambil alih kursi kekuasaan dari ayahnya sebagai pemimpin partai. Khususnya dalam hal-hal sosial ia mendukung kebijakan yang biasanya tidak terkait dengan kanan-jauh. Sebagai contoh, ia menolak untuk bergabung dengan protes massal terhadap pernikahan *gay* pada tahun 2013, dan mendukung kemitraan sipil untuk orang-orang *gay*. Le Pen juga membela hak wanita untuk melakukan aborsi.

Hal ini mungkin dapat menjelaskan mengapa Partai Front National, tampil berbeda dengan partai nasionalis yang lain, partai ini menarik banyak dukungan dari pemilih muda, dan berjuang untuk menarik sebanyak mungkin dukungan yang berjumlah lebih dari 65 partai. Para pemilih yang berusia lebih tua masih mengingat akar dari prinsip-prinsip partai yang lama, dimana prinsip tersebut lebih radikal.

Kenaikan dukungan partai di kalangan pemuda telah digambarkan sebagai kenaikan yang dramatis. Pada tahun 2012, partai ini didukung oleh 18% pemilih berusia muda. Jajak pendapat baru-baru ini menempatkan dukungannya dengan mereka yang berusia 18-24 tahun sebagai 39%. Pengangguran kaum muda, mencapai 25%, naik dari 18% pada tahun 2008, mungkin menjadi salah satu faktor.

Alain Duhamel, seorang jurnalis dan komentator politik, mendeskripsikan Front National sebagai ‘mantan partai *far-right* yang telah menjadi partai populis dengan naluri *xenophobia* dan otoriter’. Ada kesepakatan bersama bahwa Front National adalah partai nasionalis, dan manifesto partai terpusat pada identitas dan nilai-nilai Perancis, menolak model Eropa dan kekuatan internasionalis globalisasi. Front national memiliki 20 anggota parlemen, banyak ratusan dari anggota dewan daerah, dan Front National atau Walikota berafiliasi dengan Front National yang mengontrol 11 kota. Partai ini memiliki hanya 2 anggota di Majelis Nasional.

Setelah memahami latar belakang dan profil Marine Le Pen, pembahasan berikutnya adalah pemilihan Presiden kali ini, Marine Le Pen membawakan tawaran program yang dapat disederhanakan sebagai berikut:

1. Ekonomi dan Investasi Publik

- a. Mempertahankan 35 jam kerja per minggu, sembari memungkinkan fleksibilitas di tingkat cabang dan menghapus pajak penghasilan dari pembayaran lembur.
- b. Memperbaiki aturan pensiun pada usia 60 tahun, dan meningkatkan uang pensiun minimum di Perancis, sementara membuatnya bersyarat harus memegang kewarganegaraan Perancis dan memiliki riwayat tinggal selama dua puluh tahun di Perancis.
- c. Mengurangi *red-tape*⁶⁰ pada usaha kecil dan menyederhanakan serta mengurangi kontribusi sosial yang mereka bayarkan, dan tarif pajak korporasi untuk UKM.
- d. Mewajibkan negara dan aparat berwenang setempat untuk mematuhi tenggat waktu pembayaran.
- e. Membebaskan akses kredit untuk usaha kecil
- f. Memperkenalkan bonus daya beli untuk mereka yang berpenghasilan rendah dibiayai oleh kontribusi sosial 3% pada impor. (pajak ini akan tidak sejalan dengan

⁶⁰Red tape' maksudnya formalitas dan prosedur berbelit-belit yang perlu dilalui, khususnya melibatkan pengisian formulir atau penyerahan dokumentasi, sebelum bisa diambil tindakan resmi. (sumber: Radio Australia. Dapat diakses pada: <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/learn-english/resources/red-tape>)

- peraturan pasar tunggal Uni Eropa pada saat ini)
- g. Segera mengurangi harga yang diatur untuk gas dan listrik sebesar 5%.
 - h. Berjanji untuk tidak meningkatkan kontribusi PPN dan jaminan sosial dan mempertahankan pajak kekayaan.
 - i. Mengurangi tarif pajak penghasilan pada tiga kelompok pertama sebesar 10%.
 - j. Menuntaskan penggelapan pajak dan *tax havens*, memperkenalkan pajak laba yang dialihkan pada perusahaan besar.
 - k. Mengizinkan setiap orang tua untuk mengirimi pajak gratis sebesar €100.000 kepada setiap anak dalam jangka 5 tahun (yang pada saat ini 15 tahun).
2. Keamanan/hukum, dan aturan.
- a. Merekrut 15.000 petugas polisi dan polisi baru, meningkatkan sumber daya lembaga penegak hukum secara masif.
 - b. Menciptakan 40.000 penjara baru dalam lima tahun.
 - c. Memperkenalkan pendekatan ‘*nol toleransi*’ terhadap kejahatan, memperkenalkan kembali hukuman minimum dan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat untuk kejahatan yang sangat serius.
 - d. Menghentikan pembayaran tunjangan kepada orang tua pelanggar remaja yang berulang.
 - e. Menetapkan kembali pengusiran otomatis pada penjahat asing dan menandatangani perjanjian bilateral sehingga orang asing yang dihukum dapat menjalani hukuman penjara mereka di negara asal mereka sendiri.

- f. Memecahkan geng menggunakan kekuatan lebih banyak sehingga mencegah anggota geng untuk kembali ke tempat lama mereka.
 - g. Meningkatkan sumber daya dan jumlah pegawai intellijen dalam dan luar negeri dan menciptakan satu agen *counter-terrorist* yang terhubung langsung dengan Perdana Menteri.
3. Budaya/Pendidikan
- a. Memperkuat jaringan sekolah dasar dan sekolah menengah Perancis di seluruh dunia.
 - b. Lebih banyak dukungan dan sumber daya untuk pemeliharaan dan pelestarian warisan bangsa.
 - c. mencekal penjualan bangunan istana nasional dan bersejarah untuk orang asing dan sektor swasta.
 - d. Memulihkan pendidikan musik umum yang tepat di sekolah.
4. Imigrasi/Integrasi
- a. Memotong imigrasi legal menjadi 10.000 per tahun.
 - b. Otomatis mengusir imigran gelap.
 - c. Larangan pernikahan gay, tetapi izinkan kemitraan sipil sesama jenis
 - d. Melarang dan membubarkan organisasi-organisasi yang memiliki ikatan dengan fundamentalis Islam. Mengusir semua orang asing yang memiliki ikatan dengan fundamentalisme Islam.
 - e. Tutup semua masjid ekstrimis yang diidentifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan melarang pendanaan asing untuk tempat ibadah.

- f. Melarang semua pendanaan publik tempat ibadah dan kegiatan keagamaan.
 - g. Mengupas kewarganegaraan Perancis dari warga negara ganda terkait dengan organisasi jihadi, mengusir mereka dari negara dan melarang masuk kembali.
 - h. Menempatkan setiap individu dengan kewarganegaraan Perancis yang bertautan ke organisasi asing yang 'bermusuhan', ke dalam tahanan preventif.
5. *Foreign Affairs* dan Pertahanan
- a. Meninggalkan komando militer NATO yang terintegrasi
 - b. Memastikan Perancis memiliki kapasitas Pertahanan otonom di setiap wilayah.
 - c. Meningkatkan anggaran Pertahanan menjadi 2% dari PDB pada tahun pertama kantor, dan menjadi 3% pada akhir periode lima tahun. Mengabadikan 2% pengeluaran minimum ke dalam Konstitusi. Peningkatan sumber daya akan dihabiskan untuk:
 - i. kapal induk kedua;
 - ii. tambahan 50.000 personil militer;
 - iii. mempertahankan penangkal nuklir;
 - iv. peningkatan umum dalam kapasitas militer (lebih banyak pesawat, kapal, kendaraan lapis baja) dan modernisasi peralatan.
 - d. Memperkenalkan kembali Wajib Militer (minimum wajib tiga bulan).
 - e. Komitmen Perancis untuk "melayani dunia multipolar berdasarkan persamaan bangsa dimata hukum, konsultasi permanen dengan mereka dan menghormati kemerdekaan mereka. Untuk mendasarkan kebijakan luar negeri kita pada prinsip

realisme dan memberi Perancis kembali perannya sebagai kekuatan atas stabilitas dan keseimbangan.”

- f. Memperkuat hubungan antara orang-orang yang berbagi bahasa Perancis.
- g. Menerapkan kebijakan pembangunan bersama yang benar dengan negara-negara Afrika.

6. Uni Eropa

- a. mendapatkan kembali kebebasan dan kendali kita atas nasib kita sendiri dengan mengembalikan kedaulatan kepada orang-orang Perancis (kedaulatan moneter, legislatif, teritorial dan ekonomi). Untuk mencapai hal ini, negosiasi akan dilakukan dengan mitra Eropa kami, diikuti dengan referendum mengenai apakah kami harus tetap di Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk mencapai proyek Eropa yang menghormati kemerdekaan Perancis, kedaulatan nasional dan melayani kepentingan orang-orang yang berbeda. "

Marine Le Pen secara terbuka mendukung meninggalkan Euro, tetapi kebijakan ini tidak secara eksplisit ditetapkan dalam manifesto. Dia telah menyarankan lebih baru Prancis bisa tinggal di 'sistem mata uang umum' sebagai gantinya.

- b. Meskipun beberapa dari kebijakan ini bersifat domestik, mereka akan memerlukan negosiasi ulang dengan UE karena banyak dari mereka melanggar aturan UE di berbagai bidang seperti Pasar Tunggal:
 - i. Menerapkan prinsip patriotisme ekonomi ke hasil pertanian Perancis

- untuk mendukung petani dan nelayan.
- ii. Mengubah Kebijakan Pertanian Bersama menjadi Kebijakan Pertanian Perancis dengan Perancis dan bukan Uni Eropa memperbaiki subsidi.
 - iii. Menolak masuk ke dalam perjanjian perdagangan bebas seperti CETA.
 - iv. Larangan impor produk pertanian dan bahan makanan yang tidak memenuhi standar lingkungan, kesejahteraan, dan keamanan pangan Prancis.
 - v. Blokirprivatisasi/liberalisasi perkeretaapian yang disyaratkan oleh Uni Eropa, dan pertahankan Kantor Pos (*La Poste*) di tangan publik.

Marine Le Pen dengan latar belakangnya tersebut tentu tidak mengherankan apabila ia memilih untuk berkampanye dengan memperdagangkan *negativism* sebagaimana yang telah dijelaskan pada bahasan teoritik sebelumnya. Pada dasarnya, *negativism* memang cenderung *oversells* dibanding pilihan retorik yang netral dan bermain ‘aman’, kampanye jenis ini menekankan pada penderitaan daripada kompromi, perpecahan daripada persatuan, berita buruk (tentang biaya, kekalahan, kegagalan, bahaya, krisis, seks dan skandal, kematian dan bencana, ketidakmampuan politik dan korupsi, dan hal lain yang sensasional) daripada kabar baik (faedah, kemenangan, kisah sukses, peluang, solusi).

Meskipun seruan retorik dalam kampanye Marine Le Pen adalah negativisme, namun Le Pen sendiri bukanlah tokoh status quo, melainkan sama dengan Macron yang berupaya menjatuhkan gaya kepemimpinan *incumbent*, yakni Hollande. Hal ini ternyata tidak sama dengan yang dijelaskan dalam konsep strategi kampanye aktor politik di

mana aktor politik yang membela status quo menggunakan negativisme untuk memperoleh perhatian dari pemilih, karena pembela status quo tidak memiliki apapun untuk dipertahankan, sehingga mereka akan memanfaatkan rasa takut pemilih untuk memberikan perhatian kepada isu yang mereka angkat.

Marine Le Pen dalam menanggapi isu imigrasi memperdagangkan rasa takut kepada warga negara Perancis dan menjadikannya sebagai pembenaran dalam menggagas program kampanye yang secara terus terang menolak kehadiran imigran. Le Pen dengan strategi ini sudah pasti akan mendapatkan pendukung dalam kuantitas yang besar, karena ia menggunakan isu *mainstream* yang pada periode tersebut juga diperkeruh dengan kehadiran isu terorisme sebagai *exogenous shock* di Perancis.

Kendati demikian, kekuatan dari seruan retorik negatif sendiri cukup terbatas, Konsep Strategi Kampanye Aktor Politik menjelaskan bahwa setiap aktor politik yang menggunakan strategi *Mobilizing/Crafting the message* dengan seruan retorik negatif, hanya akan memancing semangat dari pemilih yang sejak awal adalah pendukungnya, sedangkan bagi pemilih jenis ambigu ataupun pemilih yang *unfavorable*nya akan memperhatikan substansi dari isi kampanye setiap aktor politik dan memilih sesuai dengan kepentingannya.

Kelebihan dari Le Pen yang mampu menjadikannya salah satu kandidat terkuat dalam pemilihan presiden tahun 2017 ini adalah bagaimana konteks dalam kampanye politiknya bersinergi dengan reputasinya sebagai tokoh nasionalis, demikian pula dengan adanya koalisi dari partai Front National menjadikannya salah satu dari pemenang pemilihan presiden putaran pertama. Akan tetapi, proses demokrasi ini merupakan *zero-sum game* di mana hanya akan ada satu pemenang; Marine Le Pen dalam kekalahannya di periode kedua pemilihan presiden tersebut

tentu dapat dijelaskan kekurangannya dalam menjalankan strategi kemenangannya.

Penulis menemukan hal menarik dalam strategi kampanye Marine Le Pen, di mana Le Pen adalah kandidat reformis yang melawan gaya kepemimpinan *incumbent* pada saat itu yakni Francois Hollande, yang merupakan tokoh sosialis, namun Le Pen menggunakan seruan retorik negatif yang menurut konsep strategi kampanye aktor politik oleh Hanggli, Kriesi, dan Bernhard cenderung hanya dimanfaatkan oleh tokoh pembela *status quo*. Meskipun, hingga saat ini belum dapat dibuktikan korelasi antara seruan retorik negatif dan aktor reformis dengan tingkat kemenangan aktor politik tersebut, namun apabila penulis menggunakan kerangka berpikir sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep strategi kampanye aktor politik, yang mengatakan bahwa *framing* memiliki efek terbatas, karena harus didukung oleh *persuading*, maka keterbatasan Le Pen dalam membuat isu yang dibawakannya menyerap ke dalam *public sphere* pada tahap ini akhirnya terjadi, karena seruan retorik positif memiliki dampak antusiasme dan semangat kebangkitan terhadap reformasi atau pembaharuan, dampak tersebut sangat berlawanan dengan strategi Le Pen yang bertujuan untuk memanfaatkan rasa takut warga negara Perancis terhadap Imigran dan Uni Eropa.

Penulis mendapati bahwa dalam strategi kampanye Le Pen, upaya *framing* yang dijalankan menemukan titik buntutnya ketika harus berhadapan langsung dengan Emmanuel Macron dalam Acara Debat Presiden Ketiga yang ditayangkan oleh saluran televisi swasta di Perancis, karena Le Pen berupaya untuk mengeksploitasi citra Macron menggunakan *track record*-nya sebagai mantan Menteri Ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Hollande yang notabene gagal dalam mewujudkan janji-janji politiknya, terlebih lagi dalam aspek ekonomi, khususnya mengurangi pengangguran; namun, Macron membawa *framingi*

tandingan yang menakuti-nakuti pemilih dengan kepemimpinan Le Pen yang tidak mampu memperhitungkan dampak dari programnya dengan baik, dan menyebut Le Pen sebagai pembohong rakyat Perancis karena ia cenderung memilih untuk menutup Perancis dari sistem internasional, hal ini yang disebut oleh Macron sebagai semangat kekalahan atau *The Spirit of Defeat*.

Kekalahan yang dimaksud oleh Macron terkait isi kampanye Le Pen secara spesifik terkait dengan isu imigrasi dan Uni Eropa. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, Le Pen mengusungkan rencana untuk mengusir imigran illegal, membatasi kedatangan imigran legal, membebaskan diri dari Uni Eropa, dan menolak masuk ke dalam perjanjian perdagangan bebas seperti EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA); menurut Macron, program-program tersebut berlawanan dengan sistem internasional atau globalisasi, dan langkah menutup diri yang ditawarkan oleh Le Pen adalah kemunduran dari Perancis sebagai negara yang sejak dahulu bahasa dan peradabannya telah mendunia dan ekonominya yang kuat, hingga saat ini didaulat sebagai salah satu kekuatan terkuat nomor lima di dunia.⁶¹

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Marine Le Pen dapat menjadi kandidat terkuat dalam Pemilihan Presiden Perancis tahun 2017 dikarenakan oleh isu yang diangkatnya bersifat *mainstream*, salah satunya adalah sikap anti-imigran yang sesuai dengan reputasinya sebagai tokoh sayap-kanan dengan prinsip nasionalis. Demikian pula dengan koalisi dari Partai Front National yang mampu memberikan popularitas dan sumber daya bagi Le Pen untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya, khususnya di media

⁶¹Disampaikan oleh Emmanuel Macron dalam Debat Capres Perancis Putaran Ketiga, tanggal 3 Mei 2017. Dapat diakses pada: <https://www.youtube.com/watch?v=dH9uXWh3n-Y&t=16s>

massa. Le Pen juga berhasil menyiarkan *value* imigran dan Uni Eropa sebagai substansi yang membawa bahaya dan kerugian bagi Perancis, meskipun terdapat kemungkinan bahwa pendukungnya tidak akan bertambah luas karena seruan retorik negatif cenderung menarik pemilih yang sejak awal sudah melekat dengan tokoh ataupun isu tertentu, bukan pemilih yang ambigu ataupun pemilih yang *unfavorable* (memilih sesuai kepentingan pribadi) bagi program-program Marine Le Pen.

Pada akhirnya, Marine Le Pen mengalami kekalahan dalam Pemilihan Presiden Perancis putaran kedua melawan Emmanuel Macron, tokoh liberal yang berasal dari partai kecil yang bernama En Marche. Penulis berargumen bahwa Marine Le Pen dan Emmanuel Macron memiliki kekuatan yang sama besarnya terkait pengangkatan isu dan pembentukan koalisi, namun dalam teknik pengolahan pesan seperti *framing* dan *persuading* (yang dijelaskan dalam konsep Strategi Kampanye Aktor Politik), Le Pen menemui kebuntuan dikala Macron yang saat itu dieksploitasi citranya oleh Le Pen, mampu menyodorkan *framing* tandingan terkait sikap anti imigran dan Uni Eropa yang dibawakan oleh Le Pen dan disebutnya sebagai *The Spirit of Defeat*. Macron menggunakan pembingkai tandingan yang berlawanan dari program Le Pen disebutnya sebagai *Spirit of Conquest*.

Dalam hal ini, penulis akan menjelaskannya secara komprehensif dalam sub-bab selanjutnya, sehingga dapat ditemukan faktor yang mampu membawa Macron mencapai kursi kemenangan dalam Pemilihan Presiden Perancis tahun 2017, meskipun ia mengangkat isu pro-imigran dan sistem internasional, khususnya Uni Eropa yang notabene adalah isu yang tidak *mainstream* di Perancis kala itu.

B. Strategi *Persuading: Spirit of French Conquest*

Dalam tatanan global yang kontemporer, semangat untuk menjadi negara terkuat dalam sistem yang anarki seperti saat ini tidak dapat dilepaskan dari jiwa sebuah bangsa dan negara. Macron menggunakan semangat ini untuk memotivasi pemilih dalam menerima informasi yang ia sampaikan terkait program-programnya sebagai Calon Presiden Perancis tahun 2017. Untuk melancarkan strategi kampanyenya, Emmanuel Macron menggunakan gerakan yang disebut sebagai *En Marche!* sebagai kendaraan politiknya, dengan gerakan ini ia menemukan berbagai macam kebutuhan dan keinginan warga Perancis, melalui tenaga relawan yang mendatangi setiap narasumber *door-to-door*, ia menciptakan program yang disesuaikan dengan kepentingan para pemilih. Kemudian, dalam konteks pembentukan koalisi, Macron merupakan tokoh reformis yang tidak berasal dari kekuatan besar seperti sayap kanan ataupun kiri. Namun, hal ini tidak menjadikannya kandidat yang lemah dalam pemilihan Presiden Perancis tahun 2017 putaran pertama, Macron berhasil memenangkan pemilihan presiden dan berhadapan langsung dengan tokoh Nasionalis yang bernama Marine Le Pen.

Emmanuel Macron, dalam menghadapi Marine Le Pen sebagai tokoh yang juga reformis, *anti-incumbent*, memilih isu yang sangat berlawanan untuk diangkat dalam kampanyenya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Prinsip Dominan oleh Riker, seorang aktor akan mengabaikan isu yang sudah pasti menguntungkan pihak lainnya, sehingga Macron dengan reputasinya sebagai tokoh liberal yang keluar dari Partai Sosialis, menggunakan manuver isu pro-imigran, pro-uni eropa, dan pro terhadap sistem internasional yang liberal, seperti pasar bebas.

Dalam kesempatan untuk membingkai citranya dan isu yang diangkat dalam kampanyenya, ia menggunakan

pembingkaihan terhadap isu pro imigran dan Uni Eropa sebagai bagian dari Perancis dalam menaklukkan dunia. Strategi Macron dalam memberikan motivasi kepada pemilih telah dijelaskan oleh Lowi sebagai *positivism*, yang menyatakan bahwa: *both positive and negative rhetoric may tend to overselling*. Positivisme yang digunakan oleh aktor politik dalam strategi *framing*, mampu melebih-lebihkan kemampuannya dalam ‘menyembuhkan’ sesuatu, dalam konteks ini Macron menyebutnya sebagai upaya untuk membawa keluar Perancis dari kelesuan ekonomi.⁶²

Reputasi Macron sebagai menteri ekonomi yang keluar dari kabinet Presiden Hollande mampu memperkuat *framing* isu yang menjadikan isu pro imigran dan Uni Eropa sebagai interaksi logika antara Perancis dan kekuatan ekonominya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *framing* memiliki efek yang terbatas, akan tetapi reputasi aktor akan menciptakan seruan retorik yang lebih meresap di *public sphere*; dalam konteks ini Macron adalah aktor reformis, dengan seruan retorik yang *positive*, sehingga penulis menyimpulkan, berdasarkan landasan konseptual strategi kampanye aktor politik, bahwa salah satu faktor kemenangan Emmanuel Macron adalah strategi *framing* yang mampu memotivasi pemilih untuk menerima isu yang diangkat dengan didukung oleh reputasinya yang liberalis, muda, dan membawa pembaharuan.

Strategi *framing* adalah kesempatan bagi aktor politik untuk membingkai citranya, lawan politiknya, dan isu yang diangkat untuk mempengaruhi *public sphere*, dalam strategi ini aktor politik akan berupaya untuk menyudutkan lawan politiknya, Le Pen adalah aktor politik yang secara gencar

⁶²Aini, Nur. Presiden Baru Prancis Emmanuel Macron Diadang Masalah Ekonomi. 2017. [Republika.com](http://www.republika.com). Dapat diakses pada: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/05/08/opm0uc382-presiden-baru-prancis-emmanuel-macron-diadang-masalah-ekonomi>

menyudutkan Macron sebagai tokoh yang membawa dampak buruk dari ganasnya globalisasi dan menteri ekonomi dari pemerintahan yang gagal, ia membangun citra sebagai tokoh yang kuat dan berani, namun dengan *framing* yang dilakukannya tersebut terhadap Macron, mengakibatkan reaksi yang sama besarnya dari Macron; dengan memanfaatkan citra negatif dan menakutkan dari Le Pen, Macron menyebut Le Pen sebagai pembohong, karena sikapnya yang berusaha untuk menyingkirkan Macron dan bukan mempertegas bagaimana programnya dapat berjalan sesuai dengan kepentingan pemilih.

Program dari Le Pen secara general bertujuan untuk membatasi Perancis diakses oleh Uni Eropa dan sistem internasional, Le Pen menyebut langkah tersebut sebagai upaya Perancis dalam membebaskan diri dari kehancuran yang disebabkan oleh Pasar Bebas. Menolak Uni Eropa dan globalisasi berarti menolak adanya imigrasi ke Perancis, sehingga isu anti-imigran adalah senjata bagi Le Pen untuk menciptakan perasaan gelisah di kalangan pemilih. Namun, Macron menjadikan senjata Le Pen tersebut sebagai *counter-attack*; sikap menutup diri dari imigran tersebut Macron definisikan sebagai ketakutan, kemudian langkah yang ditawarkan Le Pen untuk Perancis keluar dari Uni Eropa sebagai kekalahan; Macron menyebutkan bahwa dalam sejarah Perancis, bahasa dan peradaban Perancis telah berhasil membawa Perancis sebagai kekuatan besar yang mampu menaklukkan dunia, dan Le Pen dengan programnya disebut mampu menimbulkan perpecahan di Perancis, Macron menyudutkan Le Pen dengan mengatakan bahwa kelompok radikal dan teroris akan sangat menginginkan Le Pen sebagai Presiden Perancis, karena mampu memecahkan bangsa Perancis dan memicu Perang Saudara.

Hal menarik dari strategi *framing* Emmanuel Macron adalah bagaimana Macron mampu membingkai citra dan isunya sendiri sebagai kandidat yang reformis dengan menggunakan seruan retorik positif, namun di sisi lain

berhasil menyudutkan Le Pen sebagai aktor politik yang membawa kebohongan dan semangat kekalahan bagi Perancis.

Istilah *Spirit of French Conquest* disebut oleh Macron dalam Debat Calon Presiden Perancis tahun 2017, yang pada saat itu ia pakai untuk mendeskripsikan visi dan misinya terhadap Perancis dan Rakyatnya. Apabila dilihat dari sejarah Perancis, *Conquest* (penaklukan) dimulai semenjak Imperialisme diperkenalkan pada tahun 1830-an di Perancis, sebagai ‘Imperium Napoleon Bonaparte’. Imperialisme merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara-negara kaya dan berkuasa, mengawal dan menguasai negara-negara lain yang dianggap terbelakang dan miskin dengan tujuan mengeksploitasi sumber-sumber yang ada di negara tersebut untuk menambah kekayaan dan kekuasaan negara penjajahnya.⁶³

Spirit of Conquest yang Macron sebutkan untuk menamai visi dan misinya dalam memimpin Perancis, adalah strategi *persuading* yang Macron gunakan untuk meyakinkan pemilih bahwa kepentingan warga negara Perancis akan sejalan dengan program-programnya. Dalam strategi ini aktor politik akan mengolah informasi untuk dimediasikan secara terperinci kepada pemilih, serta mengendalikan perilaku lawan politiknya, namun Emmanuel Macron dalam tahap ini berhasil mempengaruhi pemilih melalui Debat Presiden Perancis Putaran Ketiga dikarenakan oleh kemampuannya mengkritisi program Marine Le Pen dan mengalahkannya dalam perdebatan tersebut.

⁶³Sunarti, Linda. *Materi Kuliah Sejarah Indonesia*. 2010. Universitas Indonesia: Jakarta. Dapat diakses pada: <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/linda.sunarti/material/phki-2.pdf>)

Sebelum Debat Calon Presiden Putaran Ketiga diadakan, Le Pen adalah kandidat dengan basis suara yang besar dan kuat, akan tetapi Macron berhasil menguatkan posisinya sebagai calon favorit setelah berhasil meyakinkan pemilih melalui berbalas retorika keras terkait ekonomi, euro, dan bagaimana menangani terorisme. Berdasarkan jajak pendapat Elabe untuk BFMTV, 63 persen pemirsa menyebut Macron lebih meyakinkan pada debat tersebut, Jajak pendapat kedua dari Harris Interactive menyimpulkan 42 persen responden memandang Macron yang berusia 39 tahun lebih meyakinkan, dan survei Ifop-Fiducial menunjukkan Macron memperlebar keunggulannya atas Le Pen dengan 61-39 persen dari 60-40 sehari sebelumnya.⁶⁴

Pada tahap ini, penulis menemukan bahwa isu pro imigran, pro Uni Eropa dan Sistem Internasional yang diangkat oleh Macron sebagai program andalannya, mampu meresap ke dalam *public sphere* diakibatkan oleh pemilih yang memiliki ketakutan terhadap Le Pen dan masa depan Perancis di tangannya. Keberhasilan Macron dalam meyakinkan *Spirit of Conquest* sebagai *anti-thesa* dari sikap Marine Le Pen yang membawa *the Spirit of Defeat*, mampu membawanya memenangi Pemilihan Presiden Perancis tahun 2017. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Emmanuel Macron berhasil memenangi Pemilihan Presiden Perancis tahun 2017 meskipun dengan mengangkat isu yang tidak *mainstream* pada saat itu, yakni pro imigran, adalah karena ia mampu melakukan *framing* terhadap Marine Le Pen sebagai tokoh yang membawa rasa takut dan kebohongan, kampanye Le Pen sendiri disebut oleh Macron sebagai *the Spirit of Defeat*.

⁶⁴Sidik, Jafar. Setelah Debat, Macron Favorit Terkuat Presiden Perancis. 2017. [Antaranews.com](https://m.antaranews.com/berita/627506/setelah-debat-macron-favorit-terkuat-presiden-prancis) (dapat diakses pada: <https://m.antaranews.com/berita/627506/setelah-debat-macron-favorit-terkuat-presiden-prancis>)

Kemudian, untuk membuat isu pro-imigran, Uni-Eropa, dan Sistem Internasional diterima oleh pemilih, Macron menggunakan strategi *persuading*; di mana ia menjadikan isu, yang disampaikan menggunakan seruan retorik positif tersebut, sebagai bentuk keberanian Perancis dalam menaklukkan globalisasi dan terorisme. Berlawanan dengan lawan politiknya, yang mencoba untuk membatasi Perancis dari sistem internasional, Macron berhasil memperoleh kepercayaan dari pemilih, sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel 4.2 yang menyebutkan bahwa seruan retorik positif yang berhasil diserap oleh *public sphere* akan menghasilkan *trust-heuristic* terhadap aktor itu sendiri, berbeda dengan aktor yang menggunakan seruan retorik negatif untuk menyudutkan lawan politiknya, aktor tersebut akan menghasilkan pemilih yang merasa tidak percaya dan anti terhadap kaum elit.